

Pemberdayaan Desa Berbasis Kebutuhan Lokal melalui Kuliah Kerja Nyata

Moehammad Bintang Aimar Andika ¹⁾; Muhamad Arju Syafaat ²⁾; Abdullah Azzam Al-ghifari ³⁾; Auliya Patih Hardinata ⁴⁾

^{1,2,3,4,5)} Universitas Sebelas Maret

Email: ¹ bimbimaimar@student.uns.ac.id, ² muhamadarjusyafaat@student.uns.ac.id,
³ azamabdul2020@student.uns.ac.id, ⁴ aulyaahrdnt@student.uns.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [04 Agustus 2026]

Revised [13 September 2026]

Accepted [16 September 2026]

KEYWORDS

Community Empowerment;
Local Needs; Adaptive
Intervention; Business
Digitalization; Community
Service.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat di Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara memerlukan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kegiatan ini bertujuan menerapkan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal melalui identifikasi masalah, penyesuaian intervensi, pendampingan, dan verifikasi keluaran. Metode kegiatan meliputi observasi, wawancara, diskusi, pemetaan kebutuhan, perancangan intervensi, pendampingan langsung, praktik, dan verifikasi keluaran. Hasil utama menunjukkan bahwa 24 unit usaha sasaran memperoleh Nomor Induk Berusaha, 12 unit usaha memperoleh atau mengaktifkan pembayaran digital, dan 15 unit usaha berhasil dicantumkan pada Google Maps. Pada kelembagaan lokal dihasilkan conveyor belt manual untuk membantu pemindahan kotoran kandang ayam serta sistem administrasi simpan pinjam berbasis Microsoft Excel. Pada kelompok masyarakat dihasilkan pestisida nabati, lubang resapan biopori, dan media edukasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian intervensi berdasarkan kebutuhan lokal dapat menghasilkan keluaran yang konkret, sedangkan perbedaan cakupan digitalisasi memperlihatkan bahwa adopsi teknologi berlangsung secara bertahap.

ABSTRACT

The diversity of challenges in Karanggondang Village, Mlonggo District, Jepara Regency, requires empowerment interventions that are adaptive to the characteristics and needs of each target group. This community service activity aimed to design and implement needs-based interventions addressing business legality and digitalization, local institutions, environmental issues, and community skills. The approach involved observation, interviews, needs assessment, solution design, mentoring, hands-on practice, and outcome verification. The interventions produced concrete outcomes, including 24 business units obtaining Business Identification Numbers, 12 business units obtaining or activating digital payment services, and 15 business units being listed on Google Maps. At the local institutional level, the program produced a chicken manure removal tool and a savings and loan administration system based on an electronic spreadsheet. For community groups, the program developed botanical pesticides, biopore infiltration holes, and educational media. These findings indicate that differentiating interventions according to local needs can generate measurable, applicable, and contextually relevant outputs. A local needs-based approach also strengthens the connection between problem identification, solution design, mentoring, and the direct implementation of outcomes by community members and local institutions.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat di tingkat desa memerlukan pendekatan yang mampu menyesuaikan bentuk intervensi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan tersebut dapat muncul pada sektor yang berbeda, mulai dari legalitas dan digitalisasi usaha, pengelolaan kegiatan ekonomi, administrasi kelembagaan, pengelolaan lingkungan, hingga pendidikan. Karena itu, pemberdayaan tidak selalu efektif apabila ditempatkan sebagai satu bentuk program yang seragam. Intervensi perlu diawali dengan pengenalan kondisi lapangan, penentuan kebutuhan prioritas, serta pemilihan bentuk pendampingan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan kelembagaan lokal. Pendekatan semacam ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai pihak yang kebutuhannya menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi.

Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara merupakan wilayah yang berada dalam lingkungan Kecamatan Mlonggo dengan aktivitas masyarakat pada berbagai sektor ekonomi dan sosial. Publikasi Kecamatan Mlonggo dalam Angka 2025 memuat data hingga tingkat desa mengenai geografi, pemerintahan, kependudukan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanian, pariwisata, transportasi, komunikasi, koperasi, perdagangan, dan pertanahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2025). Keragaman aktivitas tersebut memberikan konteks bahwa penguatan kapasitas masyarakat Desa Karanggondang tidak dapat dilepaskan dari variasi kebutuhan ekonomi dan sosial. Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Kemitraan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, kebutuhan tersebut menjadi dasar pemetaan sasaran dengan UMKM sebagai sasaran prioritas, disusul BUMDes, pemerintah desa dan Koperasi Desa Merah Putih, serta kelompok PKK dan sekolah sebagai sasaran pendukung.

Salah satu kebutuhan yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan perangkat desa terdapat pada pelaku usaha di kawasan Pantai Pailus. Pendampingan diarahkan kepada 24 unit usaha yang terdiri atas 20 warung makan, dua usaha katering, satu homestay, dan satu kedai es teh. Persoalan yang ditemukan terutama berkaitan dengan legalitas usaha dan pemanfaatan kanal digital. Pada aspek legalitas, pelaku usaha sasaran belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Pada aspek digitalisasi, pemanfaatan pembayaran digital dan pencantuman lokasi usaha pada Google Maps belum mencakup seluruh pelaku usaha. Pada acara sosialisasi legalitas yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2026, acara tersebut telah dihadiri oleh 38 pelaku UMKM. Setelah sosialisasi, pada awalnya 10 pelaku usaha menyatakan bersedia memperoleh pendampingan, tetapi melalui pendampingan langsung secara bertahap jumlah penerima pendampingan bertambah hingga 24 pelaku usaha memperoleh NIB. Pola tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan dukungan teknis untuk menerjemahkan informasi tersebut menjadi tindakan administratif.

Legalitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan usaha karena perizinan berusaha memberikan dasar legalitas bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menempatkan perizinan berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha, sementara sistem Online Single Submission digunakan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sejalan dengan itu, laman resmi Online Single Submission menjelaskan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Dalam konteks kegiatan KKN di Pantai Pailus, kebutuhan tersebut diterjemahkan ke dalam pendampingan langsung untuk membantu pelaku usaha memperoleh NIB. Capaian 24 NIB dari 24 pelaku usaha yang menjadi sasaran pendampingan menunjukkan bahwa intervensi pada aspek legalitas dapat diarahkan secara konkret melalui kombinasi sosialisasi dan pendampingan teknis.

Kebutuhan penguatan kapasitas juga ditemukan pada aspek digitalisasi. Pendampingan UMKM tidak hanya mencakup pencantuman lokasi usaha pada Google Maps, tetapi juga pengenalan dan pengelolaan WhatsApp Business, sementara 12 dari 24 UMKM yang menjadi sasaran memperoleh atau mengaktifkan pembayaran digital dan 15 usaha didaftarkan pada Google Maps. Bank Indonesia menjelaskan bahwa QRIS merupakan standar pembayaran berbasis kode QR yang memfasilitasi transaksi di Indonesia dan diarahkan sebagai salah satu pintu masuk UMKM ke ekosistem digital (Bank Indonesia, n.d.). Dalam kegiatan ini, pembayaran digital ditempatkan sebagai salah satu bentuk penguatan akses terhadap transaksi digital, sedangkan Google Maps digunakan untuk memperluas visibilitas lokasi usaha. Kegiatan pengabdian sebelumnya juga menunjukkan penggunaan QRIS dan Google Maps sebagai instrumen pendampingan digitalisasi UMKM (Nikmah & Wafa, 2025; Puspasari, Utami, Susilawati, Wulansari, & Semita, 2025; Rimadiaz et al., 2023).

Meskipun demikian, pengalaman kegiatan di Desa Karanggondang menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal tidak berhenti pada UMKM dan tidak menggunakan satu bentuk solusi untuk seluruh kelompok sasaran. Pada BUMDes Karanggondang, kebutuhan yang ditemukan berupa proses pembersihan kandang ayam yang masih dilakukan secara manual, sehingga kelompok KKN mengembangkan conveyor belt manual sebagai teknologi tepat guna. Alat tersebut dibuat dengan panjang terpal 31 meter dan diuji langsung di lokasi kandang ayam, alat ini dirancang agar dapat dioperasikan serta dirawat oleh pengelola secara sederhana. Pada pemerintah desa dan Koperasi Desa, kebutuhan yang ditemukan berbeda lagi, yaitu pencatatan Unit Usaha Simpan Pinjam yang sebelumnya belum terhubung antardata. Program SADEWA kemudian diadaptasi dari rancangan awalnya menjadi sistem administrasi berbasis Microsoft Excel yang menghubungkan data anggota, pencairan, angsuran, dan sisa pinjaman serta telah diuji melalui beberapa skenario transaksi. Pada kelompok PKK, intervensi diarahkan pada persoalan lingkungan di tingkat lokal melalui GEMA PORI, yang merespons keterbatasan sarana resapan air dan pemanfaatan sampah organik rumah tangga dengan pembuatan serta pendampingan biopori.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian berbasis kebutuhan lokal memiliki karakter yang lebih adaptif dibandingkan pelaksanaan program yang sepenuhnya ditentukan sebelum kegiatan berlangsung. Laporan SADEWA secara eksplisit mencatat bahwa fokus program diadaptasi berdasarkan kebutuhan operasional yang ditemukan di lapangan, tetapi tetap mempertahankan tujuan awal pemanfaatan data dan teknologi digital. Pada kelompok UMKM, bentuk adaptasi terlihat melalui pendampingan secara langsung dari sosialisasi hingga penyelesaian administrasi usaha, sementara pada kelompok sasaran lainnya solusi disesuaikan dengan karakter persoalan yang dihadapi. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam berbagai kegiatan pengabdian digitalisasi UMKM yang memanfaatkan pendampingan langsung untuk menghubungkan kebutuhan usaha dengan penggunaan QRIS, Google Maps, media sosial, dan instrumen digital lainnya. Namun,

sebagian literatur tersebut berfokus pada digitalisasi UMKM sebagai tujuan utama. Artikel ini menempatkan digitalisasi UMKM dalam kerangka yang lebih luas, yaitu pemberdayaan desa melalui pemetaan kebutuhan dan penyesuaian intervensi pada kelompok masyarakat serta kelembagaan dengan karakter persoalan yang berbeda.

METODE

Lokasi, Waktu, dan Sasaran Kegiatan

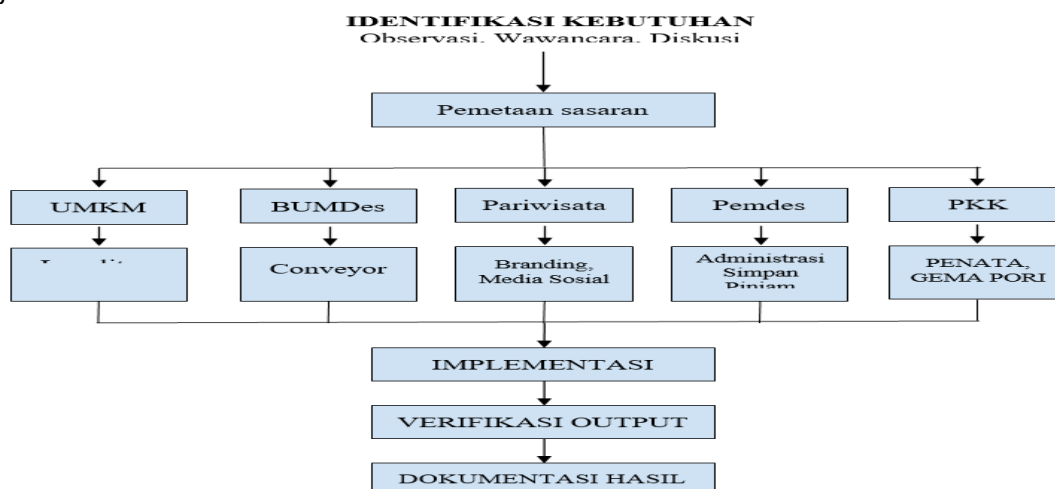
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Kemitraan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dilaksanakan di Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pada 7 Juli–21 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan 10 mahasiswa dengan pembagian tanggung jawab berdasarkan bidang program kerja yang telah ditetapkan oleh kelompok. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pembagian sasaran berdasarkan kebutuhan dan ruang lingkup intervensi. UMKM menjadi sasaran utama, khususnya pelaku usaha di kawasan Pantai Pailus. Sasaran berikutnya mencakup BUMDes Karanggondang, Pemerintah Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, kelompok PKK, serta lingkungan pendidikan. Selain mahasiswa, pelaksanaan program melibatkan pemerintah desa, pelaku UMKM, BUMDes, kelompok PKK, karang taruna, dan pihak sekolah.

Pada sektor UMKM, sasaran pendampingan mencakup 24 unit usaha di kawasan Pantai Pailus yang terdiri atas 20 warung makan, dua usaha catering, satu homestay, dan satu kedai es teh. Sementara itu, kegiatan pada BUMDes diarahkan pada pengelolaan kandang ayam milik BUMDes Karanggondang. Pada sektor pemerintahan desa, kegiatan diarahkan pada pengembangan administrasi Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih. Kelompok PKK menjadi sasaran kegiatan edukasi dan praktik terkait pestisida nabati serta biopori.

Proses Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan diskusi dengan perangkat desa serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat sekaligus menentukan bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh kelompok KKN. Pada sektor UMKM, identifikasi lapangan menunjukkan adanya kebutuhan pada aspek legalitas dan digitalisasi usaha. Sebagian pelaku usaha di kawasan Pantai Pailus belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), belum menggunakan pembayaran digital, dan belum mencantumkan lokasi usahanya pada Google Maps. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi penyusunan program pendampingan legalitas dan digitalisasi UMKM.

Kebutuhan pada sasaran lainnya memiliki karakter yang berbeda. BUMDes membutuhkan solusi untuk membantu proses pembuangan kotoran ayam dari kandang, sehingga intervensi diarahkan pada pembuatan conveyor. Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih, kebutuhan diperoleh melalui permintaan pihak pemerintah desa untuk membantu pengelolaan administrasi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Sementara itu, kegiatan PKK dirancang sebagai program edukasi dan praktik yang memberikan alternatif dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan lingkungan. Perbedaan kebutuhan tersebut menjadi dasar pembagian program ke dalam beberapa bentuk intervensi. Dengan demikian, kegiatan KKN tidak menggunakan satu bentuk pendekatan untuk seluruh kelompok sasaran, tetapi menyesuaikan bentuk kegiatan dengan kebutuhan yang ditemukan pada masing-masing lingkungan.



Gambar 1. Alur identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan intervensi KKN di Desa Karanggondang
Perancangan dan Pelaksanaan Intervensi

Setelah kebutuhan dan sasaran dipetakan, setiap program dirancang berdasarkan bentuk persoalan dan kemampuan intervensi yang dapat diberikan oleh kelompok KKN. Perancangan tersebut menghasilkan beberapa bentuk kegiatan, yaitu pendampingan legalitas dan digitalisasi UMKM, pengembangan identitas visual dan media promosi wisata, pembuatan teknologi tepat guna untuk BUMDes, pengembangan sistem administrasi Koperasi Desa Merah Putih, serta kegiatan edukasi dan praktik bersama kelompok PKK. Pada sektor UMKM, intervensi meliputi pendampingan penerbitan NIB, pembayaran digital, pencantuman lokasi usaha pada *Google Maps*, serta pengenalan penggunaan *WhatsApp Business*. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing usaha. Pada sektor pariwisata, kegiatan diarahkan pada penguatan identitas visual dan media digital Pantai Pailus serta Pantai Empu Rancak. Produk yang dikembangkan meliputi identitas visual, media promosi, akun media sosial, konten informatif, serta konten audiovisual. Pada BUMDes, intervensi diwujudkan melalui pembuatan *conveyor* sepanjang 31 meter untuk membantu proses pembuangan kotoran ayam pada kandang milik BUMDes Karanggondang. Pengembangan dilakukan melalui pembuatan alat dan uji penggunaan secara langsung pada lokasi.

Pada Pemerintah Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, intervensi dilakukan melalui pengembangan sistem administrasi simpan pinjam berbasis *Microsoft Excel* bernama SADEWA. Sistem tersebut mencakup pendataan anggota, pencatatan pencairan pinjaman dan angsuran, perhitungan pokok dan bunga, rekap sisa pinjaman, kartu angsuran, profil anggota, monitoring angsuran, validasi transaksi, navigasi, serta panduan penggunaan. Pada kelompok PKK, kegiatan dilakukan melalui dua program, yaitu PENATA dan GEMA PORI. PENATA dilaksanakan melalui sosialisasi dan praktik pembuatan pestisida nabati berbahan bawang merah, serai, cabai, dan air. GEMA PORI dilaksanakan melalui sosialisasi dan praktik pembuatan lubang resapan biopori menggunakan pipa PVC dan sampah organik rumah tangga.

Pendampingan dan Implementasi

Pelaksanaan program dilakukan secara langsung bersama kelompok sasaran sesuai dengan bentuk intervensi masing-masing. Pada UMKM, pendampingan legalitas dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan teknis penerbitan NIB. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pendampingan digitalisasi melalui aktivasi pembayaran digital dan pencantuman lokasi usaha pada *Google Maps*. Program BUMDes dilaksanakan melalui pembuatan dan penggunaan *conveyor* pada kandang ayam milik BUMDes Karanggondang. Sementara itu, sistem SADEWA dikembangkan sesuai kebutuhan Unit Usaha Simpan Pinjam dan digunakan oleh pengurus, terutama bendahara atau petugas administrasi. Kegiatan PKK menggunakan pendekatan praktik langsung. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengikuti proses pembuatan pestisida nabati dan biopori. Pendekatan yang sama diterapkan dalam program pendidikan melalui kegiatan mengajar, perayaan Hari Anak Nasional, dan sosialisasi menabung sebagai program pendukung. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada waktu yang berbeda sesuai dengan jadwal masing-masing program. Pendampingan UMKM dilaksanakan pada 1 Agustus 2026, kegiatan BUMDes pada 7 Agustus 2026, kegiatan Pemerintah Desa pada 5 Agustus 2026, PENATA pada 18 Juli 2026, GEMA PORI pada 31 Juli 2026, kegiatan pariwisata pada 29 Juli 2026, sosialisasi menabung pada 22 Juli 2026, serta kegiatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026.

Verifikasi dan Evaluasi Keluaran

Verifikasi kegiatan dilakukan dengan melihat keterlaksanaan program dan keberadaan keluaran yang dihasilkan selama periode KKN. Pada UMKM, capaian dilihat dari jumlah usaha yang memperoleh NIB, jumlah usaha yang memperoleh atau mengaktifkan pembayaran digital, serta jumlah usaha yang berhasil dicantumkan pada *Google Maps*.

Pada BUMDes, verifikasi dilakukan melalui penggunaan *conveyor* yang telah selesai dibuat pada kandang ayam BUMDes Karanggondang. Pada Koperasi Desa Merah Putih, sistem SADEWA diuji menggunakan data dan skenario transaksi yang tersedia, termasuk simulasi pencairan, angsuran, pelunasan awal, rekap sisa pinjaman, profil anggota, monitoring angsuran, validasi formula, serta navigasi sistem. Pada program PKK, keluaran dilihat dari terlaksananya praktik pembuatan pestisida nabati dan biopori, tersedianya produk hasil praktik, serta media edukasi yang diberikan kepada peserta. Pada sektor pariwisata, keluaran berupa identitas visual, media sosial, dan konten promosi untuk Pantai Pailus dan Pantai Empu Rancak. Evaluasi dalam kegiatan ini berfokus pada keluaran dan keterlaksanaan intervensi, bukan pengukuran dampak jangka panjang. Tidak terdapat data *pre-test/post-test*, pengukuran pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan, maupun pengukuran perubahan perilaku dalam periode tertentu. Oleh karena itu, artikel ini tidak akan mengklaim adanya peningkatan kesejahteraan, pendapatan, produktivitas, atau perubahan perilaku jangka panjang yang tidak dapat dibuktikan melalui data kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aktivitas

Pendampingan Legalitas UMKM Pesisir

Pendampingan legalitas menjadi salah satu intervensi utama dalam pemberdayaan UMKM di kawasan Pantai Pailus. Sasaran pendampingan terdiri atas 24 unit usaha, yaitu 20 warung makan, dua usaha catering, satu *homestay*, dan satu kedai es teh. Legalitas menjadi kebutuhan awal karena seluruh unit usaha yang menjadi sasaran pendampingan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai legalitas usaha yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2026. Sebanyak 38 pelaku UMKM mengikuti kegiatan tersebut. Pada tahap awal, 10 pelaku usaha menyatakan bersedia memperoleh pendampingan penerbitan NIB. Pendampingan kemudian dilanjutkan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha satu per satu. Melalui proses tersebut, cakupan pendampingan berkembang hingga 24 pelaku usaha memperoleh NIB.



Gambar 2. Sosialisasi dan pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku UMKM di kawasan Pantai Pailus.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi saja belum menjadi satu-satunya bentuk intervensi yang digunakan. Pendampingan teknis secara langsung menjadi bagian penting dalam membawa informasi mengenai legalitas ke tahap penerapan. Pola ini terlihat dari perubahan jumlah pelaku usaha yang bersedia memperoleh pendampingan, dari 10 pelaku pada tahap awal menjadi 24 pelaku yang akhirnya memperoleh NIB. Secara administratif, seluruh 24 UMKM sasaran telah memperoleh NIB sehingga cakupan penerbitan mencapai 100 persen dari kelompok sasaran. Nomor Induk Berusaha merupakan identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan demikian, hasil kegiatan pada aspek legalitas dapat dipahami sebagai terbentuknya fondasi administratif bagi kelompok usaha yang sebelumnya belum memiliki identitas usaha tersebut.

Digitalisasi Pembayaran dan Visibilitas Usaha

Intervensi digitalisasi diarahkan pada beberapa kebutuhan, yaitu pembayaran, penyampaian informasi usaha, dan kemudahan menemukan lokasi usaha. Selain pendampingan pembayaran digital, pelaku UMKM diperkenalkan dengan *WhatsApp Business* dan didampingi dalam pencantuman lokasi usaha pada *Google Maps*. Praktik penggunaan *WhatsApp Business* meliputi pembuatan akun, pengisian profil usaha, penyusunan katalog produk, dan pengaturan pesan otomatis. Pendampingan *Google Maps* diarahkan pada pencantuman lokasi usaha agar informasi mengenai keberadaan usaha lebih mudah diakses oleh calon pelanggan.

Dari 24 UMKM sasaran, sebanyak 12 UMKM memperoleh atau mengaktifkan pembayaran digital, sedangkan 15 UMKM berhasil didaftarkan pada *Google Maps*. Dengan demikian, cakupan pendampingan mencapai 50 persen untuk pembayaran digital dan 62,5 persen untuk pencantuman lokasi usaha.



Gambar 3. Pendampingan pembayaran digital dan pencantuman lokasi usaha pada Google Maps

Perbedaan cakupan tersebut menunjukkan bahwa adopsi digital tidak berlangsung secara seragam pada seluruh UMKM sasaran. Legalitas mencapai seluruh sasaran, sedangkan pembayaran digital dan visibilitas melalui *Google Maps* memiliki cakupan yang lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa digitalisasi usaha terdiri atas beberapa praktik yang tidak selalu memiliki tingkat adopsi yang sama. Karena kegiatan tidak mengukur karakteristik tiap pelaku usaha yang menerima atau belum menerima layanan digital, penyebab perbedaan tersebut belum dapat ditentukan secara empiris.

Pada aspek pembayaran, Bank Indonesia menempatkan QRIS sebagai standar pembayaran berbasis kode QR dan menjadikannya salah satu pintu masuk UMKM ke ekosistem digital. QRIS juga dirancang agar transaksi dapat dilakukan dengan satu kode pembayaran yang dapat digunakan oleh berbagai instrumen pembayaran. Dalam konteks kegiatan ini, 12 UMKM yang memperoleh atau mengaktifkan pembayaran digital menunjukkan adanya perluasan akses terhadap salah satu kanal transaksi digital, tetapi angka tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan pendapatan atau volume transaksi karena data tersebut tidak diukur selama kegiatan.

Penguatan Identitas Digital Destinasi Wisata

Pemberdayaan tidak hanya diarahkan kepada unit usaha secara individual, tetapi juga pada lingkungan ekonomi wisata yang menjadi tempat berkembangnya sebagian UMKM sasaran. Program Karang Visual menghasilkan identitas visual dan media digital bagi Pantai Pailus dan Pantai Empu Rancak. Produk yang dihasilkan mencakup logo, elemen visual, media promosi, akun Instagram, konten informatif, serta konten audiovisual. Pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan karakter visual masing-masing destinasi. Pantai Pailus memperoleh pengembangan identitas visual dengan karakter yang lebih hangat dan ceria, sedangkan Pantai Empu Rancak diarahkan pada karakter visual yang lebih tenang dan alami. Pengembangan media sosial dilakukan melalui akun baru karena akun Pantai Pailus sebelumnya tidak aktif, sementara Pantai Empu Rancak belum memiliki akun media sosial khusus. Konten yang dibuat mencakup pengenalan destinasi, daya tarik wisata, aktivitas, fasilitas, potensi lokal, dan informasi pendukung lainnya.



Gambar 4. Identitas visual dan pengembangan media sosial Pantai Pailus dan Pantai Empu Rancak.

Hasil tersebut memperluas cakupan pemberdayaan dari pelaku usaha menuju lingkungan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Namun, karena kegiatan tidak melakukan pengukuran jumlah kunjungan wisatawan atau perubahan interaksi media sosial sebelum dan sesudah program, hasil ini lebih tepat dipahami sebagai pembangunan infrastruktur komunikasi digital, bukan sebagai bukti peningkatan jumlah wisatawan.

Teknologi Tepat Guna untuk Operasional BUMDes

Pada BUMDes Karanggondang, kebutuhan yang diidentifikasi berkaitan dengan proses pembersihan kandang ayam yang sebelumnya dilakukan secara manual. Intervensi dilakukan melalui pembuatan *conveyor belt manual* sebagai alat bantu pemindahan kotoran ayam. Pengembangan alat mencakup tahap perancangan, pengadaan material, perakitan, dan uji coba di lokasi kandang. Satu unit *conveyor* berhasil dibuat dengan panjang terpal 31 meter dan lebar dua meter. Struktur alat menggunakan kombinasi besi beton, baja ringan, pipa, bearing, dan terpal sebagai sabuk pembawa. Alat kemudian diuji dengan menjalankan roller secara manual menggunakan engkol untuk memastikan pergerakan terpal dan kemampuan memindahkan kotoran ayam.



Gambar 5. Conveyor belt manual untuk membantu pembersihan kandang ayam BUMDes Karanggondang.

Output tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan operasional lokal dapat dijawab melalui teknologi sederhana yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kemampuan pengelola. Meskipun demikian, belum tersedia pengukuran mengenai penghematan waktu, pengurangan beban kerja, atau peningkatan efisiensi sebelum dan sesudah penggunaan alat. Oleh karena itu, capaian program pada tahap ini dinilai dari tersedianya alat, keterlaksanaan uji coba, dan penggunaannya di lokasi, bukan dari besaran peningkatan efisiensi yang belum terukur.

Digitalisasi Administrasi Koperasi Desa Merah Putih

Program SADEWA dikembangkan untuk merespons kebutuhan administrasi Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih Karanggondang. Sebelum intervensi, pencatatan anggota, pencairan pinjaman, angsuran, dan sisa kewajiban masih dilakukan melalui buku, lembar pencatatan, dan file sederhana yang belum saling terhubung. Intervensi menghasilkan *workbook Microsoft Excel* yang menghubungkan data anggota, data pencairan, data angsuran, dan sisa pinjaman. Nomor PK digunakan sebagai penghubung antar-data. Sistem juga dilengkapi perhitungan pokok dan bunga, rekap sisa pinjaman, kartu angsuran, profil anggota, monitoring angsuran, *dropdown*, validasi transaksi, *hyperlink* navigasi, serta panduan penggunaan.



Gambar 6. Tampilan sistem administrasi simpan pinjam SADEWA pada Koperasi Desa Merah Putih Karanggondang.

Pengujian dilakukan menggunakan data dan beberapa skenario transaksi, termasuk pencairan baru, angsuran reguler, pelunasan awal, rekap sisa pinjaman, validasi Nomor PK, dan monitoring angsuran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa intervensi menghasilkan sistem administrasi yang dapat digunakan untuk menata hubungan antardata dan menelusuri informasi transaksi. Namun, sistem masih memerlukan kedisiplinan dalam pembaruan data, pemeriksaan berkala, dan pencadangan. Dampak jangka panjang terhadap kinerja administrasi belum dapat dinilai dalam periode pelaksanaan KKN.

Pemberdayaan Kelompok PKK

Pemberdayaan kelompok PKK dilakukan melalui dua program, yaitu PENATA dan GEMA PORI. PENATA melibatkan 20 peserta dan memberikan pelatihan pembuatan pestisida nabati menggunakan bahan lokal berupa bawang merah, serai, dan cabai. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi dan praktik langsung mulai dari persiapan bahan, pengolahan, penyaringan, hingga proses fermentasi sebelum aplikasi. Hasil kegiatan berupa produk pestisida nabati, leaflet edukasi, dan dokumentasi penerapan.



Gambar 7. Praktik pembuatan pestisida nabati bersama kelompok PKK Desa Karanggondang.

GEMA PORI melibatkan 30 peserta dari kelompok PKK dan diarahkan pada persoalan resapan air serta pemanfaatan sampah organik rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi, penentuan lokasi, pembuatan lubang, pemasangan pipa, dan pengisian sampah organik. Kegiatan menghasilkan lubang biopori pada beberapa pekarangan warga dan media edukasi untuk mendukung penerapan berikutnya.



Gambar 8. Praktik pembuatan dan pemasangan biopori bersama kelompok PKK Desa Karanggondang.

Kedua kegiatan tersebut memperlihatkan bentuk pemberdayaan yang berbeda dari pendampingan UMKM. Intervensinya tidak diarahkan pada legalitas atau transaksi ekonomi, tetapi pada transfer pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan pada lingkungan rumah tangga. Karena tidak terdapat pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah kegiatan, capaian program dibatasi pada keterlaksanaan praktik, produk yang dihasilkan, dan tersedianya sarana edukasi.

Penyelesaian Masalah

Capaian Pendampingan dan Tingkat Jangkauan Intervensi

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa intervensi pada UMKM menghasilkan tingkat capaian yang berbeda pada setiap komponen. Dari 24 UMKM sasaran, seluruhnya memperoleh NIB, 12 memperoleh atau mengaktifkan pembayaran digital, dan 15 memiliki lokasi yang telah didaftarkan pada *Google Maps*.

Tabel 1. Capaian pendampingan legalitas dan digitalisasi UMKM

Indikator intervensi	Jumlah	Cakupan sasaran
UMKM sasaran	24	100%
NIB diterbitkan	24	100%
NIB diterbitkan	12	50%
Penitikan <i>Google Maps</i>	15	62,5%

Perbedaan tersebut memberikan satu temuan penting dalam kegiatan kali ini. Legalisasi memiliki jangkauan paling luas, sedangkan adopsi kanal digital belum merata. Capaian NIB sebesar 100 persen menunjukkan bahwa pendampingan administratif dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran ketika prosesnya dilanjutkan dengan pendampingan langsung. Sebaliknya, capaian 50 persen pada pembayaran digital dan 62,5 persen pada *Google Maps* menunjukkan bahwa perluasan kanal digital masih berada pada tahap adopsi sebagian.

Kondisi tersebut tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai kegagalan digitalisasi. Sebaliknya, perbedaan capaian memperlihatkan bahwa digitalisasi terdiri atas beberapa jenis praktik yang memiliki tuntutan implementasi berbeda. Pembayaran digital membutuhkan penerimaan metode transaksi baru, sedangkan *Google Maps* berkaitan dengan keberadaan informasi lokasi usaha. Bank Indonesia sendiri menempatkan QRIS sebagai bagian dari perluasan ekosistem pembayaran digital dan salah satu pintu masuk UMKM ke ekosistem digital.

Dengan demikian, pendekatan pendampingan di Karanggondang menunjukkan bahwa legalisasi dan digitalisasi lebih tepat diperlakukan sebagai proses bertahap, bukan satu paket intervensi yang secara otomatis menghasilkan tingkat adopsi yang sama pada seluruh usaha. Temuan ini sekaligus menjadi batas penting artikel: kegiatan telah menghasilkan adopsi pada sebagian kanal digital, tetapi belum menyediakan data yang cukup untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan sebagian UMKM belum mengadopsinya.

Pendampingan Langsung sebagai Mekanisme Penerjemahan Informasi Menjadi Tindakan

Capaian legalisasi memberikan gambaran penting mengenai peran pendampingan langsung. Sosialisasi pada 1 Agustus diikuti 38 pelaku UMKM, tetapi hanya 10 pelaku yang pada tahap awal menyatakan bersedia memperoleh pendampingan. Setelah pendampingan dilakukan secara bertahap dan langsung ke lokasi usaha, jumlah UMKM yang memperoleh NIB menjadi 24.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan implementasi administratif merupakan dua tahapan yang berbeda. Informasi memberikan pemahaman awal mengenai legalitas berusaha. Sedangkan penerapan membutuhkan bantuan teknis ketika pelaku usaha berhadapan dengan prosedur digital dan persyaratan administrasi. Dalam konteks ini, pendampingan *door-to-door* berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan pengetahuan dengan tindakan administratif.



Gambar 9. Pendampingan langsung pada lokasi usaha sebagai bagian dari proses penerbitan NIB.

Temuan ini memperkuat karakter pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal yang menjadi kerangka kegiatan. Pendekatan tidak berhenti pada penyampaian materi yang sama kepada seluruh peserta, tetapi dilanjutkan dengan bantuan sesuai kondisi masing-masing pelaku usaha. Pola yang sama terlihat pada SADEWA, ketika rancangan awal program disesuaikan dengan kebutuhan Unit Usaha Simpan Pinjam setelah kondisi lapangan dipahami.

Intervensi yang Beragam dalam Satu Kerangka Pemberdayaan Desa

Rangkaian kegiatan di Desa Karanggondang menunjukkan bahwa kebutuhan lokal tidak selalu dapat diselesaikan melalui instrumen yang sama. UMKM membutuhkan dukungan legalitas dan digitalisasi. BUMDes membutuhkan solusi teknis untuk operasional kandang ayam. Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pengelolaan data dan administrasi yang lebih terstruktur. kelompok PKK membutuhkan transfer keterampilan praktis. Kemudian destinasi wisata membutuhkan penguatan identitas serta media informasi digital.

Perbedaan bentuk intervensi tersebut bukan menunjukkan tidak adanya fokus, tetapi memperlihatkan adanya diferensiasi solusi berdasarkan karakter kebutuhan. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks pemberdayaan desa karena persoalan ekonomi, kelembagaan, lingkungan, dan sosial tidak selalu muncul dengan tingkat kesiapan dan sumber daya yang sama. Pada tingkat ekonomi lokal, intervensi UMKM menjadi komponen yang paling terukur karena memiliki kelompok sasaran yang jelas dan indikator numerik berupa NIB, pembayaran digital, dan *Google Maps*. Pada tingkat kelembagaan, SADEWA dan *conveyor* menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh pengelola. Pada tingkat komunitas, PENATA dan GEMA PORI menghasilkan praktik serta media edukasi yang dapat diterapkan oleh peserta. Dengan demikian, capaian KKN tidak tepat diringkas sebagai satu indikator keberhasilan tunggal, tetapi perlu dilihat sebagai kumpulan keluaran yang menjawab kebutuhan berbeda.



Gambar 10. Ragam bentuk intervensi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Desa Karanggondang.

Kekuatan, Keterbatasan, Peluang, dan Hambatan

Kekuatan utama kegiatan terletak pada kemampuan menyesuaikan bentuk intervensi dengan kebutuhan kelompok sasaran. Pada UMKM, seluruh sasaran pendampingan memperoleh NIB. Pada BUMDes tersedia alat *conveyor* yang telah diuji. Pada Koperasi Desa Merah Putih tersedia sistem administrasi yang telah melewati beberapa skenario pengujian. Respons positif masyarakat terhadap pendampingan juga menjadi modal sosial bagi pelaksanaan kegiatan.

Keterbatasan utama terdapat pada pengukuran *outcome* jangka menengah dan jangka panjang. Kegiatan tidak menggunakan desain pengukuran sebelum dan sesudah, sehingga perubahan pendapatan, produktivitas, perilaku digital, efisiensi kerja, atau keberlanjutan penggunaan hasil intervensi belum dapat diukur secara kuantitatif. Keterbatasan ini juga terlihat pada SADEWA yang masih membutuhkan pembaruan data, pemeriksaan, dan pencadangan secara berkala.



Sementara itu, peluang keberlanjutan terdapat pada tersedianya hasil yang dapat dilanjutkan oleh masyarakat dan pengelola, seperti NIB, kanal pembayaran digital, lokasi usaha digital, identitas media sosial destinasi, *conveyor*, SADEWA, serta sarana biopori. Namun, keberlanjutan tidak terjadi secara otomatis setelah KKN berakhir. Pengelolaan akun digital, pembaruan data, perawatan alat, dan konsistensi penggunaan hasil pendampingan tetap memerlukan penanggung jawab di tingkat lokal.

Atas dasar tersebut, penyelesaian masalah dalam kegiatan ini lebih tepat dipahami sebagai penguatan kapasitas dan penyediaan instrumen yang dapat digunakan masyarakat, bukan sebagai penyelesaian seluruh persoalan desa dalam satu periode KKN. Posisi tersebut juga menempatkan keberlanjutan sebagai tahap lanjutan yang memerlukan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan desa setelah intervensi mahasiswa berakhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Karanggondang menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal dapat dilaksanakan melalui bentuk intervensi yang berbeda sesuai dengan karakter persoalan dan kelompok sasaran. Identifikasi lapangan menghasilkan pendampingan legalitas dan digitalisasi pada UMKM, pengembangan teknologi tepat guna pada BUMDes, digitalisasi administrasi Koperasi Desa Merah Putih, kegiatan edukasi dan praktik pada kelompok PKK, serta pengembangan identitas digital destinasi wisata. Pendekatan tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat dan kelembagaan lokal sebagai dasar dalam menentukan bentuk intervensi.

Pada kelompok UMKM sebagai sasaran utama, pendampingan menghasilkan penerbitan NIB bagi seluruh 24 UMKM sasaran, sementara 12 UMKM memperoleh atau mengaktifkan pembayaran digital dan 15 UMKM berhasil didaftarkan pada *Google Maps*. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat menghasilkan keluaran konkret pada aspek legalitas dan sebagian aspek digitalisasi usaha. Namun, perbedaan tingkat capaian antar intervensi juga menunjukkan bahwa adopsi digital belum berlangsung secara merata dan tidak dapat diperlakukan sebagai proses yang seragam.

Pada sasaran lainnya, kegiatan menghasilkan keluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok, berupa *conveyor belt* manual sepanjang 31 meter untuk mendukung operasional kandang ayam BUMDes, sistem administrasi SADEWA untuk Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih, serta hasil praktik dan media edukasi melalui program PENATA dan GEMA PORI. Dengan demikian, kontribusi kegiatan tidak terletak pada penyelesaian seluruh persoalan desa dalam satu periode, tetapi pada penyediaan kapasitas, pendampingan, dan instrumen yang dapat digunakan oleh masyarakat dan kelembagaan lokal.

Keberlanjutan hasil kegiatan memerlukan pengelolaan setelah periode KKN berakhir. Pada UMKM, pendampingan lanjutan diperlukan untuk memperluas penggunaan kanal pembayaran digital dan visibilitas usaha yang belum mencakup seluruh sasaran. Pada tingkat kelembagaan, SADEWA memerlukan pembaruan data, pemeriksaan berkala, dan pencadangan, sedangkan *conveyor* membutuhkan perawatan rutin agar tetap dapat digunakan.

Program lanjutan juga perlu dilengkapi dengan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi, terutama apabila kegiatan serupa ingin menilai perubahan pendapatan, efisiensi kerja, tingkat adopsi teknologi, pengetahuan, atau keberlanjutan perilaku. Pengukuran tersebut akan memungkinkan evaluasi bergerak dari sekadar capaian keluaran menuju penilaian outcome dan dampak yang lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas dukungan terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Kemitraan Mahasiswa di Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Karanggondang, BUMDes Karanggondang, pengurus Koperasi Desa Merah Putih, pelaku UMKM di kawasan Pantai Pailus, kelompok PKK, pihak sekolah, karang taruna, serta seluruh masyarakat yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan kegiatan. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada dosen pembimbing lapangan dan seluruh anggota kelompok KKN yang berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dokumentasi, dan penyelesaian berbagai program kegiatan. Partisipasi para pihak tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal di Desa Karanggondang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. (2025). *Kecamatan Mlonggo dalam angka 2025*. <https://jeparakab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/56131d48562eb1aa0b64936c/mlonggo-district-in-figures-2025.html>
- Bank Indonesia. (n.d.). QRIS. Retrieved August 23, 2026, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (n.d.). OSS RBA: Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Retrieved August 23, 2026, from <https://oss.go.id/id>
- Nikmah, Z., & Wafa, Z. (2025). Implementasi QRIS dan pendaftaran lokasi Google Maps untuk mendukung digitalisasi transaksi UMKM Warung Alfariqi. *ABDIMAS EKODIKSOSIORA*, 5(2), 244–249. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/ABDIMASSOSIORA/article/view/10703>
- Puspasari, D., Utami, I. P., Susilawati, N., Wulansari, N. M., & Semita, N. L. (2025). Pemanfaatan Google Maps dan QRIS sebagai strategi digitalisasi UMKM di Desa Neglasari. *Jannah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 293–302. <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/jannah/article/view/357>
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no>
- Rimadiaz, S., Cahyandito, K. Y., Hibatillah, R., Giovano, G., Ferdinand, D., Lui, Y. S., & Jose, E. (2023). Pendampingan pembuatan media QRIS dan Google Maps pada UMKM. *Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 68–75. <https://jurnal.saniya.id/asskruie/article/view/65>